

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TA 2010

**EVALUASI DAN PENYUSUNAN DESA CALON
LOKASI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) 2010**

Oleh :

Rudy Sunarja Rivai
Kedi Suradisastra
Dewa Ketut Sadra Swastika
Khairina M. Noekman
Sri Wahyuni
Julia Forcina Sinuraya
Nur Khoiriyah Agustin
Yana Supriyatna
Juni Hestina
Yuni Marisa
Budi Wiryono



**PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2010**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, sebagian besar pelaku/petani menghadapi kendala dalam permodalan, baik modal yang dari sendiri maupun akses terhadap lembaga permodalan yang ada. Dalam mengatasi keterbatasan modal petani tersebut, pemerintah melalui dana APBN mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan modal dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kelompok tani/Gapoktan.

Pola BLM telah dimulai sejak tahun 2000 dan berlanjut sampai dengan tahun 2008 melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dan berlanjut dalam tahun 2010. Untuk penyempurnaan pelaksanaan PUAP tahun 2011 dan selanjutnya diperlukan kegiatan: (a) penentuan target group penerima PUAP 2010, dan (b) mengevaluasi kegiatan PUAP sebelumnya.

Evaluasi dan penetapan desa PUAP ini lanjutan dari pelaksanaan penelitian tahun 2009, untuk tahun 2010, akan dilakukan penetapan desa PUAP 2010 dan evaluasi kinerja pelaksanaan PUAP 2008 dan 2009. Pelaksanaan evaluasi kinerja PUAP 2009 telah berhasil mengidentifikasi penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP, dan untuk tahun 2010 fokus evaluasi kinerja lebih diarahkan pada lembaga keuangan mikro dan pengembangan agribisnis.

Tujuan Analisis

Penelitian ini bertujuan (1) Penyusunan 10.000 desa calon lokasi program PUAP Tahun 2010; (2) Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan BLM PUAP 2008 dan 2009; (3) Menetapkan/merumuskan saran kebijakan sebagai input rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan BLM PUAP selanjutnya.

Metoda Penelitian

Dari kesemua aspek dalam produksi pertanian ini yang terpenting adalah modal usaha. Sebagian besar petani dengan usaha kecil, umumnya terkendala oleh ketersediaan modal untuk usaha. Dengan keterbatasan aksesnya terhadap perbankan, menyebabkan modal usaha menjadi masalah besar dalam keberlanjutan dan keberhasilan usahanya. Untuk itu, program PUAP mencoba mengatasi masalah dana dengan cara menyalurkan dana kepada petani melalui kelompok tani/gapoktan. Dana PUAP pada prinsipnya hanya sebagai stimulus dalam menggerakkan usaha tani petani yang kemudian dikelola melalui LKM.

Dengan ketersediaan berbagai aspek yang dibutuhkan petani dalam usaha pertaniannya diharapkan produktivitas dan pendapatan petani meningkat sehingga bisa mengembangkan usaha mereka yang dapat menyerap tenaga kerja perdesaan dan mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan. Dampak secara keseluruhan dan spesifik dari program PUAP belum bisa terlihat, namun untuk dapat memberikan masukan dalam perbaikan perencanaan dan implementasi program PUAP kedepan, beberapa indikator yang dapat dilihat dari kinerja pengembangan usaha agribisnis, serta sampai sejauh mana PUAP bisa menyerap tenaga kerja perdesaan dan manfaatnya bagi pembangunan ekonomi perdesaan.

Evaluasi kinerja pada kajian ini ditekankan pada Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui kelembagaan Gapoktan, sesuai dengan sasaran program PUAP. Indikator kinerjanya dapat dikemukakan sebagai berikut: **Input** adalah kegiatan dan sumberdaya/dana yang dibutuhkan agar keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan. **Output** adalah sesuatu yang langsung diperoleh/dicapai dari pelaksanaan kegiatan. Untuk memperoleh Output dari Input harus melalui suatu **Proses**. Dari output dihasilkan **Outcomes**, **Outcomes** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya sesuatu keluaran. **Benefit/Manfaat** diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal. Setelah keluaran berfungsi secara optimal, pengaruh yang timbul dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan atau gambaran aspek makro tujuan proyek/kegiatan secara sektoral, regional maupun nasional (**Dampak**).

Penentuan lokasi PUAP 2010 didasarkan kepada usulan dari (1) Pemerintah daerah; (2) Aspirasi masyarakat dan (3) Program Departemen Pertanian. Ketiga sumber usulan desa calon lokasi desa PUAP tersebut, kemudian dioverlay dengan daftar desa PUAP 2008 dan 2009, setelah itu diverifikasi dengan Permendagri nomor 6 tahun 2008 tentang Data Wilayah. Setelah itu menentukan

kuota masing-masing kabupaten/kota. Selanjutnya adalah menetapkan desa yang sudah dioverlai dan diverifikasi tersebut kedalam kuota masing-masing kabupaten/kota.

Kegiatan penyusunan desa calon lokasi Program PUAP Tahun 2010 dilakukan melalui dua (2) tahapan, yakni: (1) Penyusunan daftar desa calon lokasi PUAP Tahun 2010 yang berasal dari dua sumber data seperti yang telah disebutkan di atas, dan (2) Konfirmasi desa calon lokasi PUAP Tahun 2010 dengan pihak pusat dan daerah (Tim Teknis tingkat Provinsi maupun Kabupaten). Selanjutnya disusun kuota desa untuk masing-masing kabupaten/kota. Penyusunan kuota tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut: (1) Penyebaran Usulan Aspirasi Masyarakat dan usulan Pemerintah Daerah, (2) Jumlah dan persentase desa yang belum menerima BLM PUAP, (3) Ketersediaan dana pendamping dari Pemerintah Daerah, dan (4) Pertimbangan efisiensi pendampingan program per kabupaten/kota. Desa yang selanjutnya dipilih menjadi lokasi Program PUAP disesuaikan jumlahnya dengan kuota desa per kabupaten yang telah ditentukan serta sesuai dengan ranking prioritas yang telah ditetapkan oleh Daerah.

Lokasi Penelitian dan Responden

Pada setiap provinsi lokasi penelitian dipilih satu kabupaten yang mewakili Gapoktan yang pengelolaan keuangannya telah dilakukan oleh LKM-A atau sejenisnya yang terpisah dari pengelolaan Gapoktan. Pada tiap kabupaten dipilih 2 desa/Gapoktan penerima BLM PUAP yang pengelolaan keuangannya dilakukan oleh LKM-A atau Gapoktan. Secara keseluruhan lokasi penelitian meliputi 4 (empat) provinsi, 5 kabupaten, 10 desa/Gapoktan. Lokasi penelitian dilakukan pada desa pelaksana PUAP 2008 dan atau 2009

Data primer dikumpulkan melalui wawancara kelompok (FGD) dengan pengurus dan anggota Gapoktan, penyuluh pendamping, penyelia mitra tani (PMT), dinas terkait dan aparat pemerintah daerah. Wawancara secara individu rumah tangga dilakukan secara acak mencakup 10 rumah tangga petani penerima BLM dalam setiap gapoktan yang diwawancarai, untuk mengumpulkan data karakteristik usaha dan pendapatan keluarga. Secara keseluruhan terdapat 78 responden keluarga petani yang diwawancarai dengan kuesioner terstruktur.

Hasil Penelitian

Kinerja masukan (*input*):

Pengusul Gapoktan/Desa penerima dana BLM PUAP tahun 2010 sama seperti tahun sebelumnya yaitu bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Aspirasi Masyarakat dan Unit Kerja Eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian. Terdapat perbedaan format usulan desa calon lokasi penerima dana BLM PUAP tahun 2010 dibanding dengan tahun sebelumnya. Format usulan desa tahun 2010 meliputi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Nama Gapoktan dan Nama Pengurus Gapoktan (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara).

Perbedaan format usulan, mengakibatkan bertambahnya variable yang harus dianalisa dan diverifikasi (semula hanya dua variable menjadi lima variable), selain itu harus di *overlay* terhadap penerima dana BLM PUAP 2008 dan 2009 yang mengakibatkan volume pekerjaan bertambah, sehingga penyelesaian pekerjaan identifikasi menjadi terlambat jauh dibanding tahun 2009.

Keputusan Menteri Pertanian tentang Gapoktan/Desa penerima dana BLM PUAP tahun 2010 dilakukan dalam empat tahap. Kepmentan tahap 3 merupakan optimalisasi dari beberapa kesalahan yang ada pada Kepmentan tahap 1 dan 2. Tahap 1 dikeluarkan Kepmentan No.2838/Kpts/OT.140/8/2010 Tanggal 13 Agustus 2010 dengan jumlah 6 711 Gapoktan/Desa. Tahap 2 dikeluarkan Kepmentan No.3045/Kpts/OT.140/9/2010 Tanggal 3 September 2010 dengan jumlah 3 294 Gapoktan/Desa. Tahap 3 dikeluarkan Kepmentan No. 3685/Kpts/OT.140/11/2010 Tanggal 12 November 2010 dengan jumlah 436 Gapoktan/Desa. Tahap 4 No. 3889/Kpts/OT.140/12/2010 Tanggal 14 Desember 2010 dengan jumlah 394 Gapoktan/Desa.

Usulan calon lokasi desa PUAP 2010 yang disampaikan ke Pelaksana PUAP Pusat, belum seluruhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, termasuk nomenklatur, hirarki wilayah, persyaratan pengurus gapoktan dan tidak mengulang usulan desa 2008 dan 2009. Akibatnya Kelompok Kerja Identifikasi Desa bekerja ekstra keras termasuk harus melakukan verifikasi kembali ke Daerah yang memakan waktu cukup lama, sehingga penetapan desa PUAP 2010 menjadi mundur, yang berakibat proses persiapan selanjutnya tertunda, termasuk menghambat proses usulan dana pendamping di daerah.

Walaupun sosialisasi telah dilaksanakan pada seluruh lokasi penelitian, tetapi pemahaman masyarakat sasaran terhadap program PUAP masih beragam. Terutama belum dipahaminya pengembangan kelembagaan keuangan mikro. Demikian pula pelatihan dan workshop yang diselenggarakan bagi Pengurus Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT) belum memberikan pemahaman dan keterampilan yang memadai, yang disebabkan waktu, dana, materi dan profesionalisme nara sumber kurang, serta kurang atau tidak adanya dana pendamping.

Kinerja penggunaan dana BLM PUAP dan perkembangan gapoktan beragam tergantung dari kondisi awal pembentukan Gapoktan, lingkungan agribisnis setempat dan pengelolaan simpan-pinjam (keuangan mikro). Pada Gapoktan bentuk baru dan sistem pengelolaan simpan-pinjam yang belum optimal, penggunaan dana BLM PUAP terkesan hanya bagi bagi bantuan saja, dan belum berusaha untuk mengembangkan modal BLM yang diberikan sebagai *seed capital*.

Kinerja Proses

Seperti tahun sebelumnya, dana operasional bagi pelaksana pendamping (penyuluh) dan Tim Teknis Kabupaten terbatas, yang menjadikan kendala bagi kegiatan operasional dilapangan. Pendampingan, pembinaan dan monev belum bisa dilakukan secara optimal, sehingga pengembangan agribisnis menjadi kurang/ belum optimal.

Kurang optimalnya penyelenggaraan pelatihan bagi PMT (terutama dari segi substansi) sehingga sebagian PMT masih kesulitan dalam menyusun format rekapitulasi laporan keuangan, karena dinamisnya *cash flow* keuangan Gapoktan/LKM dan belum adanya standar program (*soft file*) sistem pengelolaan keuangan baku yang dapat digunakan.

Kesulitan penyuluh pendamping dalam melakukan pendampingan dan bimbingan teknis dilapangan, selain disebabkan keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan, juga insentif, sarana (komputer dan motor) dan biaya operasional yang kurang memadai. Terutama bagi penyuluh pendamping yang mempunyai wilayah kerja/tugas lebih dari satu desa

Walaupun pengembangan dana BLM belum terlihat signifikan sebagai modal usaha gapoktan, tetapi umumnya anggota dan kelompok tani penerima BLM PUAP sudah paham, bahwa dana yang mereka pinjam adalah berupa bantuan modal usaha yang harus dikembalikan dan digulirkan pada anggota/kelompok lainnya. Hal ini terbukti dengan tingginya (hampir 100 persen) dana BLM PUAP kembali ke Pengurus/LKM.

Hampir semua Gapoktan memiliki unit usaha simpan pinjam, tetapi sebagian diantara mereka belum seluruhnya menguasai pengelolaan keuangan termasuk sistem pembukuan yang standar. Kebanyakan Gapoktan mematok bunga pinjaman satu – dua persen per bulan, dan hal ini sudah cukup membantu kebutuhan anggota untuk pengadaan input usahatani. Walaupun demikian pengembangan modal usaha belum berkembang secara signifikan.

Ketersediaan sarana produksi untuk usahatani padi belum dijumpai masalah kelangkaan secara serius. Selama kelompok tani membuat RDKK, mereka bisa memperoleh pupuk dari penyalur. Masalah yang masih dihadapi adalah sulitnya memperoleh pupuk organik untuk menerapkan teknologi PTT, dan mahal nya harga benih unggul berlabel, terutama jagung hibrida. Untuk usaha ternak sapi, petani masih menghadapi sulitnya membeli pupuk Urea untuk tanaman rumput gajah. Padahal peternak sapi sangat bergantung pada kesuburan tanaman rumput gajah untuk memenuhi kebutuhan pakan. Untuk usaha ternak babi, peternak masih menghadapi masalah mahal nya harga pakan konsentrat, sehingga mereka jarang memberi pakan konsentrat untuk ternak babin nya. Peternak hanya memberi pakan berupa ubi-ubian, sisa makanan rumahtangga, dan daun-daun ubi yang direbus, ditambah dedak dan sedikit garam dapur. Untuk usaha pembuatan tape ubikayu, pengrajin menghadapi masalah kelangkaan ubi segar pada bulan-bulan Januari sampai Maret.

Inovasi teknologi untuk usaha ternak sapi dan babi, peternak belum mendapat sentuhan inovasi baru, sehingga mereka hanya menerapkan teknologi yang mereka wariskan dari orang tua dan peternak lainnya. Demikian juga untuk usaha pengolahan hasil pertanian (pembuatan tape ubikayu di Pasuruan) pengrajin tape belum mendapat inovasi teknologi baru, sehingga mereka menggunakan teknologi tradisional yang diturunkan oleh orang tua mereka dan pengrajin lainnya.

Sebagian kecil Gapoktan dan kelompok tani penerima dana BLM PUAP sudah melakukan konsolidasi dan koordinasi pemasaran bersama, yang dapat meningkatkan posisi tawar komoditi yang diusahakannya. Sehingga harga yang diterima petani menjadi lebih baik, yang sekaligus dapat meningkatkan pendapatan usahatani.

Tersalurnya dana BLM PUAP tahun 2008 dan tahun 2009 ke rekening Gapoktan umumnya pada bulan November – Desember (akhir tahun), Akibat keterlambatan realisasi dana tersebut menyebabkan sebagian realisasi dana tidak sesuai dengan rencana (RUA, RUK dan RUB). Penggunaan dana disesuaikan dengan situasi kebutuhan pada saat dana disalurkan atau dimanfaatkan oleh petani/peserta PUAP. Perubahan tersebut sebagian tanpa didukung oleh berita acara revisi RUA, RUK dan RUB.

Sebagian besar pemanfaatan dana digunakan untuk penyediaan pupuk, bibit atau benih (pangan dan hortikultura), dan bakalan sapi/domba serta babi. Lainnya juga dimanfaatkan untuk pengembangan usaha industri rumahtangga pangan atau pemasaran hasil pertanian. Pemanfaatan dana untuk menambah modal usaha pengolahan hasil pangan cukup membantu mengembangkan usaha anggota, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Kinerja Luaran (Output)

Seluruh Gapoktan mampu mengembangkan kegiatan usaha simpan-pinjam. Namun perguliran dana bantuan menunjukkan keragaman, tergantung kepada dinamika manajemen dan kemampuan Gapoktan sebagai lembaga usaha agribisnis bertujuan komersil. Tingkat perguliran dana yang tinggi sangat erat kaitannya dengan kelancaran cicilan anggota dan pola pengembalian pinjaman. Gapoktan yang menerapkan pengembalian cicilan bulanan menunjukkan proses perguliran dana yang cepat. Akan tetapi Gapoktan yang menganut kebijakan pengembalian pada akhir masa peminjaman menunjukkan kelambatan proses perguliran dana.

Sampai tahun 2010, program PUAP di 8 desa contoh belum memperlihatkan adanya pengembangan usaha agribisnis baru dan peningkatan skala usaha, terutama untuk usahatani padi dan jagung serta pengolahan hasil pertanian. Sulitnya meningkatkan skala usahatani karena keterbatasan lahan, sementara untuk usaha pengolahan hasil adanya keterbatasan langganan. Dalam hal skala usaha, hanya usaha ternak sapi dan babi di Tabanan terlihat adanya peningkatan skala usaha. Suntikan dana PUAP untuk penguatan modal Gapoktan belum cukup untuk menciptakan usaha agribisnis baru.

Dengan adanya BLM PUAP dapat mendukung usaha agribisnis yang berupa pengadaan sarana produksi pertanian, sebagian kecil untuk pengadaan bibit ternak dan dirasakan menguntungkan karena sebelum adanya BLM PUAP dalam kegiatan budidaya tanaman pangan dan hortikultura waktu kegiatan pemupukan terlambat, jumlah pupuk yang digunakan tidak sesuai dengan dosis anjuran. Namun, setelah adanya BLM PUAP pemupukan tepat waktu, jumlah pupuk yang digunakan hampir mendekati dosis yang dianjurkan dan berdampak terjadinya peningkatan produksi, dan produktivitas berkisar 11-23 persen.

Kinerja Outcome dan Benefit

Berdasarkan hasil analisa usahatani komoditas utama dari anggota Gapoktan yang telah menerima pinjaman dana BLM PUAP, telah terjadi peningkatan pendapatan usaha. Pada usahatani tanaman padi, palawija dan hortikultura peningkatan pendapatan usahatani berkisar 11 – 33 persen dari sebelumnya. Usahatani ternak sapi dan babi terjadi peningkatan pendapatan, karena meningkatnya skala usaha sekitar 21 – 33 persen dibanding usaha sebelumnya.

Peningkatan pendapatan, juga terjadi pada usaha perdagangan dan industri rumah tangga. Pada usaha perdagangan/bakulan dan pengolahan hasil meningkatkan omzet sekitar 22 -74 persen, yang mengakibatkan terjadi peningkatan pendapatan berkisar 40 – 58 persen. Peningkatan pendapatan dan omzet per bulan usaha ini relatif lebih baik (lebih besar) dibanding usahatani *on farm*, karena terjadinya peningkatan skala usaha.

Tujuan program PUAP untuk mengurangi kemiskinan melalui penyerapan tenaga yang lebih banyak di perdesaan, kiranya masih perlu pengkajian lebih mendalam. Dari sedikit contoh beberapa Gapoktan yang disurvei, memang sudah ada tambahan tenaga kerja yang diperlukan bagi anggota/petani yang memanfaatkan dana PUAP untuk mengembangkan usahatannya. Misalnya pada kelompok komoditi tanaman padi sawah tambahan tenaga kerja yang diperlukan bisa mencapai 13 – 25 persen, usaha tanaman jagung berkisar 5 - 11 persen, pada usaha ternak sekitar 31 persen, dan peningkatan usaha warung serta pengolahan hasil meningkat sangat signifikan, yaitu berkisar 23 – 51 persen dibanding penyerapan tenaga kerja sebelumnya.

Terdapat empat jenis pengelolaan dana BLM PUP 2008 dan 2009 , yaitu : (a) Pengelolaan dana BLM PUAP oleh pengurus gapoktan, baik melalui bendahara maupun pembentukan unit usaha di bawah pengurus gapoktan yang melakukan pengelolaan dana BLM PUAP, (b) Pengelolaan dana BLM PUAP oleh kelompok tani dibawah pengendalian Gapoktan PUAP., (c) Pengelolaan dana BLM PUAP oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM atau LKM-Agribisnis), dan (d) Pengelolaan dana BLM PUAP oleh pembentukan Koperasi baru di luar Gapoktan.

Implikasi Kebijakan

Penetapan Gapoktan/Desa penerima dana BLM PUAP tahun 2010 terdapat banyak kesalahan karena jumlah usulan Gapoktan/Desa calon lokasi penerima dana BLM PUAP jauh melebihi jumlah yang akan disalurkan (yaitu 10 000 Gapoktan/Desa), sehingga kesulitan dalam proses penyaringannya. Untuk proses penyusunan Kepmentan tentang desa dan gapoktan penerima BLM PUAP selanjutnya, terlebih dahulu Tim PUAP Pusat menetapkan kuota masing-masing Kabupaten/Kota, setelah itu setiap pengusul mengusulkan Gapoktan/Desa sesuai dengan jumlah kuota masing-masing.

Secara keseluruhan, penyebaran desa gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2010 (menurut ke empat Kepmentan tersebut), kurang merata disemua wilayah maupun kabupaten/kota. Berazaskan pemerataan, keadilan dan membantu daerah yang terbelakang, baiknya usulan calon lokasi desa PUAP 2011 lebih merata dan meyebar diwilayah yang memang memerlukan bantuan BLM PUAP, serta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum PUAP.

Perlu dibentuk Tim Sosialisasi PUAP yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan/mobilisasi masyarakat, termasuk dalam sosialisasi ini melakukan Forum Group Diskusi (FGD) secara partisipatif sebagai bahan dalam menyusun RUK dan RUB. Perlu diberikan waktu yang cukup, tenaga yang terampil dan dana yang memadai untuk meningkatkan kinerja Tim Sosialisasi PUAP ini.

Dalam rangka memperbaiki kinerja Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani serta untuk mengembangkan program PUAP kedepan diperlukan peningkatan dan pengembangan pelaksanaan pelatihan dan pembekalan ilmu dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan kompetensi pelaksana PUAP di daerah. Materi pelatihan peningkatan keterampilan hendaknya dikembangkan sesuai dengan kondisi spesifik lokasi pelaksanaan program PUAP dan karakteristik Gapoktan di setiap lokasi pengembangan.

Saat ini peran PMT lebih kepada pembinaan administratif keuangan Gapoktan dan menyusun laporan progres PUAP saja. Keberadaan PMT ini perlu lebih diberdayakan sebagai konsultan dan fasilitator pengembangan usaha agribisnis perdesaan Gapoktan. Misalnya bersama dengan BPTP dapat menjadi media dan fasilitator pengembangan inovasi teknologi komoditi utama yang dikembangkan.

Kebijakan terkait upaya fasilitas pendidikan dan penyebaran informasi dan teknologi layak dikembangkan dan diintegrasikan kedalam kebijakan pemerintah otonom guna mempercepat laju alih informasi dan teknologi secara optimal. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut dapat dikembangkan kedalam program dan proyek pendidikan komunikasi internet dan media komunikasi lainnya. Termasuk dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan kinerja penyusunan dan penyampaian laporan reguler.

Perlu lebih diberdayakan lagi Tim Teknis kabupaten dan Penyuluh pendamping, bukan hanya melalui pelatihan dan *workshop* saja, tetapi insentif/honor, dana operasional dan perlengkapan/sarana yang diperlukan agar dapat dipenuhi. Tidak mungkin dapat ditingkatkan kinerja Tim Teknis kabupaten dan Penyuluh pendamping tanpa persyaratan tersebut diatas terpenuhi. Karena salah satu sumber dana untuk hal tersebut adalah dana pendamping, maka kewajiban Pemerintah daerah untuk memfasilitasinya. Oleh karena itu penetapan lokasi desa PUAP di awal tahun harus segera dilakukan dan dapat dijadikan justifikasi untuk memperoleh anggaran dana pendamping di daerah

Dalam rangka pengembangan agribisnis komoditas utama, banyak ditemukan berbagai masalah dan kendala yang tidak mungkin dapat diatasi oleh Pelaksana PUAP saja. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi dan integrasi dengan Program Strategis Departemen Pertanian lainnya, misalnya dengan program SLPTT, PS2DS, Pengembangan Kawasan Horti, FEATI, dan Pengembangan Agropolitan serta program terkait lainnya. Bila memungkinkan dapat diintegrasikan (lokasi dan komoditi) dengan program Dinas terkait yang memperoleh dana dari anggaran Tugas Pembantuan, yang dirancang untuk mengembangkan komoditas unggulan.

Untuk menumbuhkembangkan keuangan mikro, perlu diwajibkan kepada semua Gapoktan dan LKM/UKMnya agar berusaha untuk menggalang dana diluar dana BLM PUAP. Minimal semua penerima pinjaman dana BLM, diwajibkan untuk memberikan simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela. Lebih dari itu adalah menggalang sumber dana diluar anggota untuk menyimpan dana di LKM/UKM Gapoktan dengan bunga yang menarik. Membuat produk jasa bank yang lainnya juga dapat dilakukan, termasuk usaha diluar usahatani. Untuk maksud ini perlu dilakukan training/workshop lanjutan bagi Manajer LKM/UKM dan Ketua Gapoktan.

Karena penyaluran dana BLM PUAP 2009 terlambat lagi seperti tahun lalu, maka RUA, RUK dan RUB yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anggota, agar nanti dalam implementasi pengembangan usaha agribisnis dapat dilakukan revisi/perbaikan RUA, RUK dan RUB, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat pada kajian evaluasi kinerja pelaksanaan PUAP tahun 2010 ini sangat terbatas jumlah lokasinya, sehingga mengalami kesulitan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan kinerja pelaksanaan PUAP 2008 dan 2009 (yang saat ini jumlahnya telah lebih dari 20 000 desa). Sehingga diperlukan kajian yang lebih fokus, mendalam dan cakupan yang lebih luas (contoh yang representatif) sesuai dengan kebutuhan program PUAP ke depan, terutama dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro. Bila diperlukan ada kaji tindak beberapa model LKM di beberapa lokasi desa program PUAP yang sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya.

Saran

Untuk mempercepat penerbitan Keputusan Menteri Pertanian tentang desa penerima dana BLM PUAP 2011, disarankan format usulan desa penerima dana BLM PUAP kembali pada format PUAP 2008 dan 2009, yaitu cukup Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa saja. Selanjutnya usulan Gapoktan dan Pengurusnya disampaikan oleh masing-masing Bupati/Walikota sesuai dengan Kepmentan dan ketentuan Pedoman Umum PUAP.

Untuk mempercepat proses identifikasi desa dan mengurangi langkah verifikasi ulang di daerah, maka usulan calon lokasi desa PUAP dari aspirasi masyarakat dan program lingkup Kementerian Pertanian agar berkoordinasi dengan Kepala Wilayah (Bupati dan Walikota), sehingga semua usulan calon lokasi desa PUAP sudah diketahui dan diverifikasi oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kemampuan pengelolaan dalam implementasinya di daerah

Agar pemahaman dan pengertian program PUAP dapat ditingkatkan pada semua calon peserta, sosialisasi program perlu di intensifkan, termasuk menyiapkan Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP. Sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaksana (Pengurus Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani) maka kinerja pelatihan dan persiapan SDM PUAP perlu ditingkatkan dengan materi yang dapat diterapkan dan narasumber yang kompeten sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Pendampingan, pembinaan dan monitoring pelaksanaan program PUAP di Daerah perlu ditingkatkan, untuk tercapainya maksud ini ketersediaan dana pendamping di Daerah sangat diperlukan. Oleh karena itu diwajibkan bagi Kabupaten/Kota penerima dana BLM PUAP untuk menyediakan dana pendamping yang sesuai dengan kebutuhan.

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan teknologi baru dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan, oleh karena itu perlu didorong bagi anggota Gapoktan PUAP penerima dana BLM untuk menerapkan inovasi teknologi baru yang spesifik lokasi. Untuk maksud ini kegiatan diseminasi inovasi teknologi bagi peserta program PUAP perlu ditingkatkan.

Agar pelaksanaan program PUAP sesuai dengan rencana Gapoktan (petani/peserta program PUAP) maka penyaluran dana BLM PUAP perlu dipercepat, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan untuk pengembangan agribisnis sesuai kebutuhan. Untuk maksud tersebut, dapat diterbitkan Kepmentan tentang Gapoktan dan Pengurus penerima dana BLM PUAP lebih dari satu kali.

Dalam perguliran dana BLM PUAP berikutnya, perlu diprioritaskan bagi usaha-usaha pengembangan agribisnis yang perguliran modalnya lebih cepat dan keuntungan yang diperoleh lebih tinggi, sehingga dapat mempercepat sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Agar percepatan pengembangan agribisnis di Daerah dapat ditingkatkan, maka perlu dilakukan integrasi desa dan Gapoktan penerima dana BLM PUAP dengan Program Strategis Kementerian

Pertanian lainnya, seperti: SLPTT, PS2DS, Pengembangan Kawasan Hortikultura, FEATI dan Pengembangan Agropolitan, serta program terkait lainnya, termasuk program subsektor lain yang dapat menunjang pengembangan agribisnis.

Diperlukan studi khusus pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) yang sesuai dengan lingkungan agribisnis lokal, sehingga dapat memberikan masukan yang lebih komprehensif dan mendalam untuk pengembangan LKM pada Gapoktan/desa penerima BLM PUAP.